



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH PEMBERLAKUAN PP NOMOR 56 TAHUN 2005
TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
TERHADAP PENETAPAN DAN PENYAMPAIAN PERDA APBD**

TESIS

**RAHMAT E. SIREGAR
NPM : 0806430411**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JULI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH PEMBERLAKUAN PP NOMOR 56 TAHUN 2005
TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
TERHADAP PENETAPAN DAN PENYAMPAIAN PERDA APBD**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

**RAHMAT E. SIREGAR
NPM : 0806430411**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
JAKARTA
JULI 2010**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Juli 2010

(Rahmat E. Siregar)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Rahmat E. Siregar

NPM : 0806430411

Tanda Tangan :

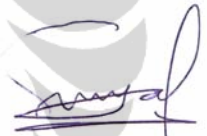
Tanggal : Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Rahmat E. Siregar
NPM : 0806430411
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Pengaruh Pemberlakuan PP Nomor 56 Tahun 2005
Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap
Penetapan dan Penyampaian Perda APBD

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surjadi, SE, MA. ()

Ketua Penguji : Komara Djaja, Ph.D. ()

Anggota Penguji : Niniek L.Gyat, M.Soc.Sc. ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2010

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi 'alamin, puji syukur kepada Allah ta'ala, yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul " Pengaruh Pemberlakuan PP Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Penetapan dan Penyampaian Perda APBD ". Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Surjadi, MA, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Para pejabat pengelola keuangan di beberapa daerah, pimpinan, rekan kerja, dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini;
3. Kedua orang tua dan mertua tercinta, Siti Rohmah, istriku tersayang beserta anak-anakku Amir, Musa, dan putri kecilku Husna atas doa, bantuan, kerelaan berkorban dengan penuh kesabaran serta selalu memberikan dukungan moral.

Penulis menyadari bahwa keterbatasan ilmu dan pemahaman yang penulis miliki membuat tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Atas perhatian semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, Juli 2010

Penulis,

Rahmat E. Siregar

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat E. Siregar
NPM : 0806430411
Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pengaruh Pemberlakuan PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Penetapan dan Penyampaian Perda APBD

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Juli 2010
Yang menyatakan

(Rahmat E. Siregar)

ABSTRAK

Nama : Rahmat E. Siregar
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Pengaruh Pemberlakuan PP Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap
Penetapan dan Penyampaian Perda APBD

Tesis ini membahas pengaruh pemberlakuan PP Nomor 56 Tahun 2005 terhadap penetapan dan penyampaian Perda APBD mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menganalisis data sekunder berupa tanggal penetapan dan penyampaian Perda APBD. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan kajian lebih lanjut mengenai batas waktu penetapan dan penyampaian Perda APBD untuk meningkatkan kedisiplinan pemerintah daerah dalam hal tersebut; kerja sama antarinstansi pemerintah perlu ditingkatkan dalam hal evaluasi rancangan Perda APBD; kasus-kasus mengenai penetapan Perda APBD tahun 2009 yang sudah ada perlu diteliti lebih lanjut sebagai rekomendasi bagi proses penetapan Perda APBD daerah lain di masa mendatang.

Kata kunci : PP Nomor 56 Tahun 2005, keuangan daerah, APBD

ABSTRACT

Name : Rahmat E. Siregar
Study Program : Planning and Public Policy
Title : The Impact of Government Regulation Number 56 Year
2005 about The Regional Financial Information System
on The Establishment and Submission of Local
Government Budget

This study discusses the impact of Government Regulation Number 56 Year 2005 on the establishment and submission of local government budget from year 2007 to 2009. This study use descriptive methode to analyze secondary data from the approval and submission date of local government budget. The results suggest that further study is needed regarding the deadlines of local government budget approval and submission date to increase local governments discipline; cooperation of government agencies need to be improved in terms of local government budget evaluation draft; the existing cases of the establishment of local government budget year 2009 should be investigated as recommendations for further establishment process of local governmet budget.

Keywords : Government Regulation Number 56 Year 2005, regional financial, local government budget

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Ruang Lingkup	10
2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Proses Anggaran Pemerintah Daerah	11
2.1.1 Prinsip-prinsip Proses Penganggaran Pemerintah Daerah	12
2.1.2 Siklus Anggaran Pemerintah Daerah	13
2.1.2.1 Persiapan dan Perumusan Anggaran	16
2.1.2.2 Tinjauan Legislatif dan Persetujuan	20
2.1.2.3 Pelaksanaan dan Evaluasi	24
2.1.3 Perbandingan Jadwal Penganggaran Pemerintah Daerah pada Negara Thailand, Vietnam, dan Indonesia	26
2.1.3.1 Jadwal Penganggaran Pemerintah Daerah di Thailand	27
2.1.3.2 Jadwal Penganggaran Pemerintah Daerah di Vietnam	29
2.2 Format Anggaran Pemerintah Daerah	31
2.3 Siklus Penganggaran APBD di Indonesia	32
3. METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1 Pendekatan Penelitian	37
3.2 Jenis dan Sumber Data	39
3.3 Kerangka Berpikir Pemecahan Masalah	46
3.4 Hipotesa	47
3.5 Periode dan Jadwal Penelitian	48
4. BERBAGAI KONDISI PENETAPAN DAN PENYAMPAIAN PERDA APBD SERTA IMPLIKASI-IMPLIKASINYA	49
4.1 Perda-Perda APBD Tahun Anggaran 2007-2009 yang Ditetapkan Paling Tepat Waktu Sesuai dengan Ketentuan PP No. 56 Tahun 2005	49

4.2	Perda-Perda APBD Tahun Anggaran 2007-2009 yang Disampaikan Sesuai dengan Ketentuan PP No. 56 Tahun 2005, tetapi Disampaikan Lebih dari Satu Kali	55
4.2.1	Analisis Kasus Perda APBD 2009 Kota Jayapura	61
4.2.2	Analisis Kasus Perda APBD 2008 Provinsi Sulawesi Utara	63
4.3	Perda-Perda APBD Tahun Anggaran 2007-2009 yang Ditetapkan Terlambat dan Dikenakan Sanksi Berdasarkan Ketentuan PP No. 56 Tahun 2005	65
4.4	Penetapan Perda-Perda APBD Provinsi Tahun Anggaran 2007 Sampai dengan Tahun Anggaran 2009	73
4.5	Penetapan Perda-Perda APBD Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2009	79
4.5.1	Analisis Penetapan Perda APBD Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera	82
4.5.2	Analisis Penetapan Perda APBD Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa..	82
4.5.3	Analisis Penetapan Perda APBD Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan dan Sulawesi	83
4.5.4	Analisis Penetapan Perda APBD Kabupaten dan Kota di Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua	85
4.6	Perbandingan antara Penetapan Perda APBD Provinsi dengan Penetapan Perda APBD Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 Sampai dengan Tahun Anggaran 2009	88
4.7	Proses Monitoring dan Evaluasi Serta Pemberian Sanksi oleh Ditjen Perimbangan Keuangan dengan PP No. 56 Tahun 2005	91
5.	KESIMPULAN DAN SARAN	94
5.1	Kesimpulan	94
5.2	Saran	95
	CATATAN AKHIR	98
	DAFTAR PUSTAKA	100
	LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Perda APBD yang Tidak Disampaikan kepada Ditjen Perimbangan Keuangan Sebelum Pemberlakuan PP Nomor 56 Tahun 2005	6
Tabel 3.1	Ilustrasi Tanggal Penetapan Perda APBD TA 2007-2009	43
Tabel 3.2	Periode dan Jadwal Penelitian	48
Tabel 4.1	Ranking Skor Perda APBD TA 2007-2009 yang Ditetapkan Paling Tepat Waktu	51
Tabel 4.2	Daftar Perda APBD TA 2008 yang Disampaikan Lebih dari Satu Kali ...	57
Tabel 4.3	Daftar Perda APBD TA 2009 yang Disampaikan Lebih dari Satu Kali ...	59
Tabel 4.4	Perbandingan Jenis dan Jumlah Perubahan pada Perda APBD TA 2008-2009	58
Tabel 4.5	Daftar Daerah yang Mengalami Sanksi Penundaan Penyaluran DAU TA 2007-2009	66
Tabel 4.6	Perkembangan Kemajuan Tanggal Penetapan Perda APBD Provinsi TA 2007-2009	75
Tabel 4.7	Tanggal Penetapan Perda APBD 33 Provinsi di Indonesia TA 2007-2009	77
Tabel 4.8	Tanggal Penetapan Perda APBD Kabupaten dan Kota Pada 32 Provinsi di Indonesia TA 2007-2009	80
Tabel 4.9	Perkembangan Kemajuan Tanggal Penetapan Perda APBD Kabupaten dan Kota TA 2007-2009	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	APBD Sebagai Produk Akhir Dari RPJP Daerah	34
Gambar 2.2	Proses Penyusunan dan Penetapan Perda APBD	36
Gambar 3.1	Kerangka Berpikir Pemecahan Masalah	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Tanggal Penetapan Perda APBD TA 2007-2009	103
------------	---	-----

